



Sekolah Bukan Sekadar Bangunan



Danar W, Krjogja - Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:30 WIB



Romo Bernardus Agus Rukiyanto, SJ.

KRjogja.com - PIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 memberi tempat penting kepada pendidikan. Janji memperbaiki seluruh **sekolah** yang rusak hingga 2029 patut disambut baik. Ruang kelas yang aman, sanitasi yang layak, serta meja dan kursi yang memadai merupakan syarat dasar pembelajaran. Namun, pendidikan berhenti pada tembok yang dicat dan atap yang tidak bocor.

Jika pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja, kita mungkin menghasilkan lulusan yang terampil, tetapi kehilangan manusia yang mampu menimbang baik dan buruk, merawat ingatan bersama, serta menghormati perbedaan. Sekolah harus menjadi tempat anak mengenal dunia sekaligus memahami akar kebudayaannya.

Gagasan Ki Hadjar Dewantara tetap relevan. Pendidikan merupakan proses menuntun tumbuhnya kekuatan kodrati anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kata “menuntun” berbeda dari menyeragamkan.

Guru bukan operator kurikulum, sedangkan murid bukan wadah kosong yang cukup diisi target dan angka.

Karena itu, renovasi sekolah perlu disertai pembaruan ekosistem belajar. Perpustakaan perlu selalu terbuka bagi para peserta didik. Laboratorium seni tidak boleh dianggap pelengkap. Pelajaran sejarah perlu menghubungkan peristiwa nasional dengan pengalaman kampung, kota, dan keluarga. Bahasa daerah seharusnya hadir sebagai sumber pengetahuan, humor, etika, dan cara melihat dunia, bukan sekadar mata pelajaran yang diuji lalu dilupakan.

Yogyakarta dapat memberi contoh. Di samping gedung sekolah dan kampus, Yogyakarta dipenuhi dengan sanggar, padepokan, museum, komunitas baca, keraton, kampung, pasar, serta ruang pertunjukan. Sekolah semestinya membuka pintu kepada seniman, budayawan, perajin, pelaku tradisi, dan penjaga situs sejarah. Para murid perlu lebih sering belajar keluar kelas: meneliti sungai, mendokumentasikan cerita warga, membaca aksara Jawa, memahami tata ruang kampung, atau pun mengenali perubahan lingkungan.

Pendekatan tersebut bukan nostalgia. Di tengah kecerdasan buatan dan banjir informasi, anak membutuhkan daya cipta, kepekaan, kemampuan membaca konteks, dan pertimbangan etis. Teknologi dapat memberikan jawaban cepat, tetapi kebudayaan mengajarkan pertanyaan apa yang pantas diajukan dan untuk kepentingan siapa pengetahuan digunakan.

Pemerintah karena itu perlu mengukur keberhasilan pendidikan secara lebih utuh. Prestasi akademik penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Kebiasaan membaca, keberanian berdialog, kemampuan bekerja sama, kepedulian terhadap lingkungan, apresiasi seni, dan penghormatan kepada sesama juga merupakan hasil pendidikan. Indikator semacam ini memang lebih sulit dihitung, tetapi justru menentukan mutu kehidupan bangsa.

Untuk itu, anggaran pendidikan hendaknya tidak habis terserap oleh bangunan, perangkat, dan program seragam dari pusat. Pemerintah daerah perlu memperoleh ruang sekaligus tanggung jawab untuk mendukung perpustakaan desa, sanggar, kunjungan museum, penerbitan bacaan lokal, serta kolaborasi sekolah dengan komunitas. Di Yogyakarta, hubungan antara sekolah dan ekosistem budaya sebenarnya tersedia. Yang dibutuhkan ialah kebijakan yang berkelanjutan, bukan kegiatan seremonial sesaat. Kebudayaan harus hadir dalam jadwal, pembiayaan, dan praktik belajar sehari-hari agar pengalaman tersebut menjangkau semua anak, termasuk di pelosok daerah.

Guru memegang peranan utama. Mereka memerlukan penghasilan layak, pelatihan bermutu, waktu membaca, dan ruang untuk merancang pembelajaran sesuai keadaan setempat. Kebijakan yang terus berubah dan administrasi berlapis hanya akan menghabiskan energi guru. Negara perlu memercayai guru, sambil memastikan pendampingan dan pertanggungjawaban yang sehat.

Pidato Presiden telah memberikan arah penting melalui komitmen memperbaiki sekolah. Komitmen itu akan semakin bermakna apabila pembangunan fisik dipadukan dengan keberanian membangun kebudayaan belajar. Setiap sekolah perlu tumbuh sebagai pusat pengetahuan di lingkungannya: terbuka sesuai jam pelajaran, menghidupkan perpustakaan, memamerkan karya murid, dan mempertemukan generasi muda dengan para pemilik pengetahuan lokal.

Pada usia kemerdekaan ke-81, bangsa ini tidak cukup membangun sekolah yang kokoh. Indonesia membutuhkan sekolah yang memerdekakan pikiran, memperhalus budi, dan meneguhkan identitas tanpa menutup diri terhadap dunia. Dari sanalah pendidikan menjadi kebudayaan, dan kebudayaan menjadi tenaga untuk menjaga Republik. (Bernardus Agus Rukiyanto, Dosen Universitas Sanata Dharma)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Danar W